

**BAHAN AJAR**

*(Student Active Learning: Studi Kasus, Diskusi Kelompok, Problem Based Learning)*

**PANCASILA**



**Oleh:**

**Suci Damayanti, S.H., M.H.**

[sucidamayanti@upy.ac.id](mailto:sucidamayanti@upy.ac.id)

**PROGRAM STUDI HUKUM BISNIS  
FAKULTAS BISNIS DAN HUKUM  
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKART**

## A. DASAR-DASAR PENDIDIKAN PANCASILA

### 1. Dasar Filosofis

Ketika Republik Indonesia diproklamasikan pasca Perang Dunia kedua, dunia dicekam oleh pertentangan ideologi kapitalisme dengan ideologi komunisme. Kapitalisme berakar pada paham individualisme yang menjunjung tinggi kebebasan dan hak-hak individu, sementara komunisme berakar pada paham sosialisme atau kolektivisme yang lebih mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan individual. Pertentangan ideologi ini telah menimbulkan ‘perang dingin’ yang dampaknya terasa di seluruh dunia. Namun para pendiri negara Republik Indonesia mampu melepaskan diri dari tarikantarikan dua kutub ideologi dunia tersebut, dengan merumuskan pandangan dasar (*philosophische grondslag*) pada sebuah konsep filosofis yang bernama Pancasila yang berperan menjaga keseimbangan. Rumusan tentang Pancasila digali dari akar budaya masyarakat bangsa Indonesia sendiri. Dengan demikian nilai-nilai dalam Pancasila merupakan karakter bangsa, yang menjadikan bangsa Indonesia berbeda dengan bangsa-bangsain. Oleh karena itulah Pancasila disebut mengandung nilai-nilai dasar filsafat (*philosophische grondslag*), merupakan jiwa bangsa (*volksgeist*) atau jati diri bangsa (*innerself of nation*), dan menjadi cara hidup (*way of life*) bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Dengan demikian nilai-nilai dalam Pancasila merupakan karakter bangsa, yang menjadikan bangsa Indonesia berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Pendidikan Pancasila perlu karena dengan cara itulah karakter bangsa dapat lestari, terpelihara dari ancaman gelombang globalisasi yang semakin besar.

### 2. Dasar Sosiologis

Bangsa Indonesia yang penuh kebhinekaan terdiri atas lebih dari 300 suku bangsa yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau, secara sosiologis telah mempraktikkan Pancasila karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan kenyataan-kenyataan (materil, formal, dan fungsional) yang ada dalam masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia yang plural secara sosiologis membutuhkan ideologi pemersatu Pancasila. Oleh karena itu nilai-nilai Pancasila perlu dilestarikan dari generasi ke generasi untuk menjaga keutuhan masyarakat bangsa. Pelestarian nilai-nilai Pancasila dilakukan khususnya lewat proses pendidikan formal, karena lewat pendidikan berbagai butir nilai Pancasila tersebut dapat disemaikan dan dikembangkan secara terencana dan terpadu.

### 3. Dasar Yuridis

Pancasila sebagai norma dasar negara dan Dasar Negara Republik Indonesia yang berlaku adalah Pancasila yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pembukaan UUD NRI Tahun 1945) *junctis* Keputusan Presiden RI Nomor 150 Tahun 1959 mengenai Dekrit Presiden RI/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Tentang Kembali Kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. Naskah Pembukaan UUD NRI 1945 yang berlaku adalah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang disahkan/ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945. Sila-sila Pancasila yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 secara filosofis-sosiologis berkedudukan sebagai Norma Dasar Indonesia dan dalam konteks politis-yuridis sebagai Dasar Negara Indonesia. Konsekuensi dari Pancasila tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, secara yuridis konstitusional mempunyai kekuatan hukum yang sah, kekuatan hukum berlaku, dan kekuatan hukum mengikat.

Nilai-nilai Pancasila dari segi implementasi terdiri atas nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar terdiri atas nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai Persatuan Indonesia, nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai dasar ini terdapat pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, dan Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa nilai dasar tersebut harus dijabarkan konkret dalam Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945, bahkan pada semua peraturan perundang-undangan pelaksanaannya.

## **B. TUJUAN PENYELENGGARAAN**

Secara spesifik tujuan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi adalah untuk:

1. Memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
4. Membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila, untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia.

## **C. CAPAIAN PEMBELAJARAN**

1. S1: Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;

2. S2: Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
3. U1: Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
4. K9P: Mampu mengimplementasikan Nilai Pancasila dan Konstitusi pada masyarakat

#### D. METODE PEMBELAJARAN

Pilihan strategi pengembangan metode pembelajaran Pendidikan Pancasila yang berbasis kompetensi dengan pendekatan *Student Active Learning*. Metode pendekatan *Student Active Learning* ini meliputi antara lain:

1. Studi kasus  
Pada metode pembelajaran ini mahasiswa diberikan kasus yang perlu dicari pemecahan masalahnya sesuai dengan pokok bahasan yang sedang dibahas.
2. Tugas kelompok  
Metode pembelajaran dengan memberikan tugas kepada mahasiswa yang telah dibuat kelompok, misalnya dalam bentuk karangan atau makalah, kliping dan/atau mengamati suatu kejadian.
3. *Problem-Based Learning* (PBL)  
Metode belajar yang menggunakan masalah yang kompleks dan nyata untuk memicu pembelajaran sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru.

#### E. RENCANA PEMBELAJARAN

Pertemuan	Topik Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Kriteria Penilaian	Bobot
1-2	Pancasila dalam Sejarah Bangsa Indonesia Bagian 1: - Pengantar Sejarah Pembentukan Pancasila	- Ceramah - Diskusi	Kemampuan memahami materi	5%
3	Pancasila dalam Sejarah Bangsa Indonesia Bagian 2: a. Pancasila sebagai Identitas	- Ceramah - Diskusi	Kemampuan memahami materi	5%

	<p>Bangsa Indonesia</p> <p>b. Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia</p> <p>c. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia</p> <p>d. Pancasila sebagai Jiwa Bangsa</p> <p>e. Pancasila sebagai Perjanjian Luhur</p>			
4-5	<p>Pancasila Sebagai Dasar Negara:</p> <p>Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Hankam.</p>	<p>- Ceramah</p> <p>- Studi Kasus</p>	<p>Kemampuan memberi kritik dan analisa terhadap kebijakan pemerintah</p>	10%
6-7	<p>Pancasila Sebagai Ideologi Negara</p>	<p>- Ceramah</p> <p>- Diskusi Kelompok</p>	<p>Kemampuan analisis dan Keberanian menyampaikan pendapat yang logis</p>	5%
8-9	<p>Pancasila Sebagai Sistem Filsafat:</p> <p>a. Pengertian Filsafat;</p> <p>b. Filsafat Pancasila;</p>	<p>- Ceramah</p> <p>- <i>Small Group Discussion</i></p>	<p>Kemampuan berdiskusi yang menghasilkan argument yang logis tentang</p>	15%

	c. Makna sila-sila Pancasila.		materi yang disampaikan	
10-11	Pancasila Sebagai Sistem Etika: a. Pengertian Etika dan Etika Pancasila; b. Pancasila sebagai <i>problem solving</i> degradasi moral bangsa.	- Ceramah - <i>Problem Based Learning</i> (PBL) - Presentasi	Kemampuan menyampaikan hubungan etika dengan masalah moral yang terjadi saat ini	20%
12-14	Pancasila Sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu: a. Nilai Ketuhanan; b. Nilai Kemanusiaan; c. Nilai Persatuan; d. Nilai Kerakyatan; e. Nilai Keadilan.	- <i>Problem Based Learning</i> (PBL) - Presentasi	Kemampuan menemukan masalah keilmuan yang sesuai/tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila	20%
15-16	Kuis dan Ujian Akhir	Close Book	Kemampuan menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan tepat.	20%

## F. FORMAT PENUGASAN

### Tugas 1 diberikan pada Minggu Ke 3

#### I. Penugasan:

1. Mahasiswa dikelompokkan dalam beberapa kelompok dengan topik kebijakan pemerintah yang berbeda-beda meliputi Ekonomi, Politik, Hukum, Sosial, Budaya dan Lingkungan;
2. Masing-masing kelompok mencari, menemukan dan mengidentifikasi satu kebijakan pemerintah serta hubungannya dengan Pancasila sebagai Dasar Negara yang dituangkan dalam makalah dan power point presentasi;

## II. Kriteria Penilaian

1. Kemampuan memilih topik yang menarik untuk diangkat;
2. Kemampuan menunjukkan permasalahan yang jelas;
3. Kemampuan menunjukkan keterkaitan topik dengan materi Pancasila sebagai Dasar Negara;
4. Kemampuan memberikan Solusi untuk topik yang sedang dibahas.

## III. Indikator Kinerja

Grade	Skor	Indikator Kerja
Sangat Baik	85-100	Topik menarik, Permasalahan jelas, keterkaitan topik dengan materi Pancasila sebagai Dasar Negara, Solusi
Baik	65-84	Topik menarik, Permasalahan jelas, keterkaitan topik dengan materi Pancasila sebagai Dasar Negara, tidak ada solusi
Cukup	45-64	Topik menarik, Permasalahan tidak Jelas, topik dengan materi Pancasila sebagai Dasar Negara kurang terkait, Solusi
Kurang	<45	Topik tidak menarik, Permasalahan tidak jelas, topik dengan materi Pancasila sebagai Dasar Negara kurang terkait, Solusi

## IV. Tujuan Penugasan

Mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi kebijakan pemerintah yang sesuai/tidak sesuai dengan Pancasila. Tugas ini mengharapakan mahasiswa agar suatu saat mereka mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai orientasi dalam pembuatan atau pelaksanaan kebijakan.

### Tugas 2 diberikan pada Minggu Ke 10

#### I. Penugasan:

1. Mahasiswa dikelompokkan dalam beberapa kelompok dengan topik Keterkaitan Pancasila sebagai Etika dengan Degradasi Moral Saat ini.
2. Masing-masing kelompok mencari, menemukan dan mengidentifikasi satu kasus degradasi moral yang sedang banyak terjadi saat ini dengan mengaitkan Pancasila sebagai Etika yang dituangkan dalam maksimal 5 slide power point presentasi;

#### II. Kriteria Penilaian

1. Kemampuan memilih topik yang menarik untuk diangkat;
2. Kemampuan menunjukkan permasalahan yang jelas;
3. Kemampuan menunjukkan keterkaitan topik Pancasila sebagai Etika dengan Degradasi Moral Saat ini;
4. Kemampuan memberikan Solusi untuk topik yang sedang dibahas.

### III. Indikator Kinerja

Grade	Skor	Indikator Kerja
Sangat Baik	85-100	Topik menarik, Permasalahan jelas, keterkaitan topik dengan materi Pancasila sebagai Dasar Negara, Solusi
Baik	65-84	Topik menarik, Permasalahan jelas, keterkaitan topik dengan materi Pancasila sebagai Dasar Negara, tidak ada solusi
Cukup	45-64	Topik menarik, Permasalahan tidak Jelas, topik dengan materi Pancasila sebagai Dasar Negara kurang terkait, Solusi
Kurang	<45	Topik tidak menarik, Permasalahan tidak jelas, topik dengan materi Pancasila sebagai Dasar Negara kurang terkait, Solusi

### IV. Tujuan Penugasan

Mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi satu kasus degradasi moral yang sedang banyak terjadi saat ini dengan mengaitkan Pancasila sebagai Etika. Tugas ini mengharapkan mahasiswa agar mampu mengedepankan Etika dan moral sesuai Pancasila.

#### Tugas 3 diberikan pada Minggu Ke 12

##### I. Penugasan:

1. Mahasiswa dikelompokkan dalam beberapa kelompok dengan topik menemukan masalah keilmuan yang sesuai/tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
2. Masing-masing kelompok mencari, menemukan dan mengidentifikasi satu kasus masalah keilmuan yang sesuai/tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang dituangkan dalam maksimal 5 slide power point presentasi;

##### II. Kriteria Penilaian

1. Kemampuan memilih topik yang menarik untuk diangkat;
2. Kemampuan menunjukkan permasalahan yang jelas;



3. Kemampuan menunjukkan masalah keilmuan yang sesuai/tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila;
4. Kemampuan memberikan Solusi untuk topik yang sedang dibahas.

### III. Indikator Kinerja

Grade	Skor	Indikator Kerja
Sangat Baik	85-100	Topik menarik, Permasalahan jelas, keterkaitan topik dengan materi Pancasila sebagai Dasar Negara, Solusi
Baik	65-84	Topik menarik, Permasalahan jelas, keterkaitan topik dengan materi Pancasila sebagai Dasar Negara, tidak ada solusi
Cukup	45-64	Topik menarik, Permasalahan tidak Jelas, topik dengan materi Pancasila sebagai Dasar Negara kurang terkait, Solusi
Kurang	<45	Topik tidak menarik, Permasalahan tidak jelas, topik dengan materi Pancasila sebagai Dasar Negara kurang terkait, Solusi

### IV. Tujuan Penugasan

Mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi menemukan masalah keilmuan yang sesuai/tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tugas ini mengharapakan mahasiswa agar mampu berpikir kritis dan melatih kepekaan terhadap masalah keilmuan saat ini.

### G. PERUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN

#### 1. Pancasila dalam Sejarah Bangsa Indonesia

##### Indikator:

- a. Mahasiswa mampu memahami perbedaan Sejarah Pembentukan Pancasila.
- b. Mahasiswa mampu memahami Pancasila sebagai Identitas Bangsa Indonesia, Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia, Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, Pancasila sebagai Jiwa Bangsa, Pancasila sebagai Perjanjian Luhur.

#### 2. Pancasila sebagai Dasar Negara

##### Indikator:

- a. Mahasiswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Mahasiswa mampu menampilkan dan memberikan kritik serta evaluasi terhadap kebijakan baik Politik, Ekonomi, Hukum, Sosial, Budaya, dan Lingkungan yang dikaitkan dengan Pancasila sebagai Dasar Negara.
- c. Mahasiswa mampu menginternalisasi sikap menjunjung tinggi penegakan hukum dan norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai bukti kecintaan terhadap Pancasila.

### **3. Pancasila sebagai Ideologi Negara**

#### **Indikator:**

- a. Mahasiswa mampu memahami alasan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara;
- b. Mahasiswa mampu membedakan Ideologi Pancasila dengan pemahaman liberalism, komunisme, dan hubungannya dengan agama.

### **4. Pancasila sebagai Filsafat**

#### **Indikator:**

- a. Mahasiswa mampu memahami perbedaan filsafat dan filsafat Pancasila;
- b. Mahasiswa mampu memahami makna sila-sila yang terkandung dalam Pancasila;
- c. Mahasiswa mampu memberikan contoh penerapan makna sila-sila Pancasila;

### **5. Pancasila sebagai Etika**

#### **Indikator:**

- a. Mampu mengkaji berbagai literatur yang dapat membentuk dan membangun pemahaman bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijadikan dasar pengembangan ilmu;
- b. Mahasiswa mampu mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam butir-butir Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

## **H. PENUTUP**

Alur perumusan mata kuliah Pancasila disesuaikan dengan standar kompetensi, capaian dan pembelajaran. Mahasiswa diharapkan mampu memiliki sikap, keterampilan dan pengetahuan tentang Pancasila secara menyeluruh. Outputnya, mahasiswa dapat menjunjung tinggi nilai, norma dan etika ketika menerapkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## **I. URAIAN MATERI**

### **BAHASAN: PANCASILA DALAM SEJARAH BANGSA INDONESIA BAGIAN I**

#### **a. Sejarah Pembentukan Pancasila**

##### **1. Pembahasan Dalam Sidang Bpupki.**

- a) Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* dibentuk pada 28 Mei 1945 yang terdiri dari seorang Ketua

(*Kaico*), dua orang Ketua Muda (*Fuku Kaico*) dan dengan 59 orang anggota biasa (*In*) ditambah 7 (tujuh) orang Jepang sebagai anggota istimewa (*Tokubetu In*).

- b) 2) Persidangan BPUPKI dilaksanakan dalam dua masa persidangan. Masa Sidang Pertama pada 28 Mei – 1 Juni 1945 dan Masa Sidang Kedua pada 10 – 17 Juli 1945.
- c) Ketua BPUPKI, Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, mengawali Rapat Besar BPUPKI pada 29 Mei 1945 dengan meminta para anggota BPUPKI untuk terlebih dahulu berbicara tentang “dasar negara” yang akan menjadi dasarnya Indonesia merdeka.
- d) Pokok-pokok gagasan tentang dasar negara antara lain sebagai berikut:
  - **Mr. Moh. Yamin** dalam notulen rapat tentang pidatonya pada 29 Mei 1945 yang disampaikan secara lisan dicatat bahwa meskipun tidak secara khusus menyampaikan hal dasar negara, namun dikemukakan dasar yang tiga, yaitu:
    - (1) Permusyawaratan
    - (2) Kebijaksanaan (rationalism)
    - (3) Selain itu Mr. Moh. Yamin juga mengemukakan bahwa peradaban Indonesia mempunyai Ketuhanan Yang Maha Esa.
  - **K.R.M.T.H. Woerjaningrat** dalam pidatonya pada 29 Mei 1945 antara lain menyatakan bahwa ‘kemerdekaan harus bersendi kekeluargaan bangsa Indonesia’.
  - **Drs. Moh. Hatta** dalam pidatonya pada 30 Mei 1945 antara lain menyatakan bahwa dasar Ketuhanan harus diwujudkan dengan memisahkan urusan agama dari urusan negara.
  - **Mr. Soepomo** dalam pidatonya pada 31 Mei 1945 menyatakan antara lain bahwa dasar persatuan, semangat kekeluargaan dan semangat gotongroyong sangat sesuai dengan corak masyarakat Indonesia. Lain dari itu juga dinyatakan pentingnya dasar moral yang luhur agar negara memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.
  - **Ir. Soekarno** dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 mengemukakan 5 prinsip yang merupakan *philosofische grondslag* (pandangan hidup) dan dasar negara, yaitu:
    - 1) Kebangsaan Indonesia
    - 2) Internasionalisme, atau peri-kemanusiaan
    - 3) Mufakat, atau demokrasi
    - 4) Kesejahteraan social
    - 5) Ketuhanan yang berkebudayaan

Ir. Soekarno juga menawarkan bahwa bila dikehendaki hanya tiga maka menjadi *socio-nationalism*, *socio-democratie*, dan *Ketuhanan*. Apabila dikehendak hanya satu saja maka menjadi gotong-royong. Dengan demikian Ir. Soekarno menjadi satu-satunya pembicara yang secara utuh, jelas dan tegas menyatakan tentang dasar negara sebagai *philosofische grondslag*.

## 2. Pembentukan Panitia Kecil

Sidang BPUPK mengalami reses pada 2 Juni hingga 9 Juli 1945. Sebelum masa reses Dr. Radjiman membentuk Panitia Kecil yang beranggotakan 8 (delapan) orang dipimpin oleh Ir. Soekarno. Panitia Kecil bertugas menghimpun masukan atau usul dari segenap anggota BPUPK tentang Indonesia Merdeka. Setelah Panitia Kecil melaksanakan tugasnya, di luar tugas yang dibebankan pada Panitia Kecil, Ir. Soekarno mengundang para anggota BPUPK untuk rapat di Kantor Besar Djawa Hookookai. Rapat tersebut dihadiri oleh 38 orang anggota BPUPK. Dalam rapat tersebut dibentuk Panitia Kecil yang beranggotakan 9 (sembilan) orang, yaitu Ir. Soekarno selaku Ketua, dan anggota-anggota, Drs. Moh. Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abikoeso Tjokrosoeyoso, Abdoel Kahar Moezakir, H. Agoes Salim, Mr. Achmad Soebardjo, K.H. Wachid Hasjim, dan Mr. Muh. Yamin. Panitia ini kemudian disebut sebagai Panitia Sembilan.

Pada 22 Juni 1945 Panitia Sembilan tersebut berhasil menyepakati suatu Naskah Preambule atau Mukaddimah Undang-Undang Dasar yang kemudian oleh Mr. Muh. Yamin disebut sebagai Piagam Jakarta yang kemudian diterima sebagai bahan rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar.

Rumusan Pancasila dalam naskah Piagam Jakarta ialah “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan – perwakilan serta dengan mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

## 3. Penetapan dalam Sidang PPKI

Panitia Persiapan Kemerdekaan atau *Dokuritsu Zyunbi Iinkai* dibentuk oleh Jepang dengan Ketua ialah Ir. Soekarno dan Wakil Ketua ialah Drs. Moh Hatta. Panitia Persiapan Kemerdekaan tersebut, menjelang Rapat Besar pada 18 Agustus 1945, diubah menjadi badan nasional dengan menambahkan (enam) anggota yang berasal dari daerah-daerah, sehingga secara keseluruhan berjumlah 27 orang, dan disebut Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Drs. Moh. Hatta mengusulkan penyempurnaan sila I dan II menjadi *Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab* yang disempurnakan lagi oleh Ki Bagus Hadikoesoemo dengan menghapus kata-kata “menurut dasar”

sehingga menjadi *Ketuhanan Yang Maha Esa* sebagai sila I dan *Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab* sebagai sila II. Dengan demikian rumusan Pancasila secara resmi dan sah ditetapkan pada 18 Agustus 1945 sebagaimana dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 sebagaimana Pancasila yang kita kenal saat ini.

## **BAHASAN: PANCASILA DALAM SEJARAH BANGSA INDONESIA BAGIAN II**

### **1. Pancasila sebagai Identitas Bangsa Indonesia**

Kebudayaan bangsa Indonesia merupakan hasil inkulturasi, yaitu proses perpaduan berbagai elemen budaya dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadikan masyarakat berkembang secara dinamis. (J.W.M. Bakker, 1984: 22) menyebutkan adanya beberapa saluran inkulturasi, yang meliputi: jaringan pendidikan, kontrol, dan bimbingan keluarga, struktur kepribadian dasar, dan *self expression*. Kebudayaan bangsa Indonesia juga merupakan hasil akulturasi sebagaimana yang ditengarai Eka Dharmaputera dalam bukunya Pancasila: Identitas dan Modernitas. Pancasila sebagai identitas bangsa atau juga disebut sebagai jati diri bangsa Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai literatur, baik dalam bentuk bahasan sejarah bangsa Indonesia maupun dalam bentuk bahasan tentang pemerintahan di Indonesia.

### **2. Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia**

Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Sikap mental, tingkah laku dan perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. keadilan juga terdapat dalam ideologi bangsa-bangsa lain, tetapi bagi bangsa Indonesia kelima sila tersebut mencerminkan kepribadian bangsa karena diangkat dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia sendiri.

### **3. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia**

Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebajikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan nyata (Bakry, 1994: 158). Pancasila sebagai pandangan hidup artinya bahwa nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak.

### **4. Pancasila sebagai Jiwa Bangsa**

Sebagaimana dikatakan von Savigny bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing, yang dinamakan *volkgeist* (jiwa rakyat atau jiwa bangsa). Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia (Bakry, 1994: 157).

### **5. Pancasila sebagai Perjanjian Luhur**

Perjanjian luhur, artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara (*political consensus*) sebagai dasar negara Indonesia (Bakry, 1994: 161). Kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan sesuatu yang tepat.

### **6. Sumber Historis, Sosiologis, Politis Pancasila**

#### **a. Sumber Historis**

Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman Kerajaan dahulu. Misalnya, sila Ketuhanan sudah ada pada zaman dahulu, meskipun dalam praktik pemujaan yang beranekaragam, tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui.

#### **b. Sumber Sosiologis**

Nilai-nilai Pancasila (ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan) secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang adalah nilai gotong royong. Misalnya dapat dilihat, bahwa kebiasaan bergotongroyong, baik berupa saling membantu antar tetangga maupun bekerjasama untuk keperluan umum di desa-desa. Kegiatan gotong royong itu dilakukan dengan semangat kekeluargaan sebagai cerminan dari sila Keadilan Sosial.

#### **c. Sumber Politis**

Sebagaimana diketahui bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari local wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain.

## **BAHASAN: PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA**

### **1. Pancasila sebagai Dasar Negara**

Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana terdapat pada pembukaan, juga dimuat dalam Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998, tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan ketetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.

Selain itu, juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, yaitu sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara sering juga disebut sebagai *Philosophische Grondslag* dari negara, ideologi negara, staatsidee. Dalam hal tersebut, Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintah negara. Atau dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara (Darmodiharjo, 1991: 19).

Latif (Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR periode 2009--2014, 2013) menguraikan pokok-pokok moralitas dan Haluan kebangsaan-kenegaraan menurut alam Pancasila sebagai berikut:

Pertama, nilai-nilai ketuhanan (religiusitas) sebagai sumber etika dan spiritualitas (yang bersifat vertical transcendental) dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Negara menurut Pancasila diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama; sementara agama diharapkan dapat memainkan peran publik yang berkaitan dengan penguatan etika social.

Kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial (bersifat horizontal) dianggap penting sebagai fundamental etika-politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia.

Ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh.

Keempat, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.

Kelima, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh artinya sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial.

ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) dan di dalam Pasal 36A jo. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, mengandung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi

konstitusional. Konsekuensinya, Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Selain itu, bagi warga negara yang berkiprah dalam suprastruktur politik (sektor pemerintah), yaitu lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, Pancasila merupakan norma hukum dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak

## **2. Pancasila sebagai Ideologi Negara**

### **Defenisi ideologi menurut beberapa tokoh:**

- a. Sastrapratedja (2001: 43): "Ideologi adalah seperangkat gagasan/ pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur".
- b. Soerjanto (1991: 47): "Ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya".
- c. Mubyarto (1991: 239): "Ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja (atau perjuangan) untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu".
- d. Martin Seliger: Ideologi sebagai sistem kepercayaan
- e. Alvin Gouldner: Ideologi sebagai Proyek Nasional, yaitu sesuatu yang muncul dari suatu cara baru dalam wacana politis tetapi harus dipisahkan dari kesadaran mitis dan religious
- f. Paul Hirst: Ideologi sebagai Relasi Sosial.

### **Fungsi Ideologi**

- a. Struktur kognitif; keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia, serta kejadiankejadian di lingkungan sekitarnya.
- b. Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia.
- c. Norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak.
- d. Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya
- e. Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan.
- f. Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya (Soerjanto, 1991: 48).

### **Jenis Ideologi**



- a. Marxisme-Leninisme; suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip; pertama, penentu akhir dari perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi; kedua, proses perubahan sosial bersifat dialektis.
- b. Liberalisme; suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual, artinya lebih mengutamakan hak-hak individu.
- c. Sosialisme; suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat, artinya negara wajib menyejahterakan seluruh masyarakat atau yang dikenal dengan konsep welfare state.
- d. Kapitalisme; suatu paham yang memberi kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan
- e. modal yang ia miliki (Sastrapratedja, 2001: 50 – 69).

### **Unsur-Unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila**

- a. Unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c. Kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Salah satu dampak yang dirasakan dari kapitalisme ialah munculnya gaya hidup konsumtif.

### **Unsur Penting dalam Kedudukan Pancasila sebagai Orientasi Kehidupan Konstitusional**

- a. Kesiapan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing;
- b. Aktualisasi lima sila Pancasila, artinya sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara sebagai berikut:
  - 1) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dirumuskan untuk menjamin tidak adanya diskriminasi atas dasar agama sehingga negara harus menjamin kebebasan beragama dan pluralisme ekspresi keagamaan.
  - 2) Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menjadi operasional dalam jaminan pelaksanaan hak-hak asasi manusia karena hal itu merupakan tolok ukur peradaban serta solidaritas suatu bangsa terhadap setiap warga negara.
  - 3) Sila Persatuan Indonesia menegaskan bahwa rasa cinta pada bangsa Indonesia tidak dilakukan dengan menutup diri dan menolak mereka yang di luar Indonesia, tetapi dengan membangun hubungan timbal balik atas dasar kesamaan kedudukan dan tekad untuk menjalin kerjasama yang menjamin kesejahteraan dan martabat bangsa Indonesia.

- 4) Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan berarti komitmen terhadap demokrasi yang wajib disukseskan.
- 5) Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia berarti pengentasan kemiskinan dan diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok-kelompok lemah perlu dihapus dari bumi Indonesia (Magnis Suseno, 2011: 118--121).

## **BAHASAN: PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT**

### **Pengertian filsafat**

Berdasarkan watak dan fungsinya sebagaimana yang dikemukakan Titus, Smith & Nolan sebagai berikut:

1. Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. (arti informal)
2. Filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. (arti formal)
3. Filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. (arti komprehensif).
4. Filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. (arti analisis linguistik).
5. Filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. (arti aktual-fundamental).

### **Pancasila sebagai sistem filsafat**

Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau yang dinamakan filsafat Pancasila artinya refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Sastrapratedja menjelaskan makna filsafat Pancasila sebagai Pengolahan filosofis Pancasila sebagai dasar negara ditujukan pada beberapa aspek. *Pertama*, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. *Kedua*, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. *Ketiga*, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. *Keempat*, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkutan paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional (Sastrapratedja, 2001: 3)

Pancasila sebagai genetivus-subjectivus, artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai

dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipakai dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi juga nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Misalnya, Sastrapratedja (2001: 2) mengatakan bahwa Pancasila adalah dasar politik, yaitu prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Adapun Soerjanto (1991:57-58) mengatakan bahwa fungsi Pancasila untuk memberikan orientasi ke depan mengharuskan bangsa Indonesia.

Landasan ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan *raison d'être* sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman atas hakikat sila-sila Pancasila itu diperlukan sebagai bentuk pengakuan atas modus eksistensi bangsa Indonesia.

Littlejohn and Foss menyatakan bahwa epistemologi merupakan cabang filosofi yang mempelajari pengetahuan atau bagaimana orang-orang dapat mengetahui tentang sesuatu atau apa-apa yang mereka ketahui. Problem pertama tentang cara mengetahui itu ada dua pendapat yang berkembang dan saling berseberangan dalam wacana epistemologi, yaitu rasionalisme dan empirisme. Kaum rasionalis berpandangan bahwa akal merupakan satu-satunya sarana dan sumber dalam memperoleh pengetahuan sehingga pengetahuan bersifat *a priori*. Empirisisme berpandangan bahwa pengalaman inderawi (empiris) merupakan sarana dan sumber pengetahuan sehingga pengetahuan bersifat *a posteriori*.

Problem kedua tentang pada tingkatan apa pengetahuan dapat menjadi sesuatu yang pasti berkembang menjadi dua pandangan, yaitu pengetahuan yang mutlak dan pengetahuan yang relatif. Pancasila dapat dikatakan sebagai pengetahuan yang mutlak karena sifat universal yang terkandung dalam hakikat sila-silanya, yaitu Tuhan, manusia, satu (solidaritas, nasionalisme), rakyat, dan adil dapat berlaku di mana saja dan bagi siapa saja. Notonagoro menamakannya dengan istilah Pancasila abstrak-umum universal.

Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman (empiris) bangsa Indonesia, kemudian disintesis menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong.

## **BAHASAN: PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA**

### **Pengertian Etika**

Istilah “etika” berasal dari bahasa Yunani, “Ethos” yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun masyarakat.

### **Etika Pancasila**

Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Sila ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta, ketaatan kepada nilai agama yang dianutnya. Sila kemanusiaan mengandung dimensi *humanus*, artinya menjadikan manusia lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Sila persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan (*mitsein*), cinta tanah air. Sila kerakyatan mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengar pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Sila keadilan mengandung dimensi nilai mau peduli atas nasib orang lain, kesediaan membantu kesulitan orang lain.

### **Pancasila sebagai Sistem Etika**

Beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika itu diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara.
2. Korupsi, Kolusi, Nepotisme merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Para penyelenggara negara tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan tidak, pantas dan tidak, baik dan buruk (*good and bad*).
3. Kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak.
4. Pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM) dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain.

5. Kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, Nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain sebagainya.

## **BAHASAN: PANCASILA SEBAGAI DASAR NILAI DALAM PENGEMBANGAN ILMU**

### **Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu**

Pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia, artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu (mempribumikan ilmu).

Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. *Kedua*, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. *Ketiga*, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara Barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan.

### **Sumber Historis Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu**

Sumber historis Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dapat ditemukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 berbunyi:

*”Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, **mencerdaskan kehidupan bangsa**, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, ... dan seterusnya”.*

Kata “**mencerdaskan kehidupan bangsa**” mengacu pada pengembangan iptek melalui pendidikan. Amanat dalam Pembukaan UUD 1945 yang terkait dengan mencerdaskan kehidupan bangsa itu haruslah berdasar pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, dan seterusnya, yakni Pancasila. Proses mencerdaskan kehidupan bangsa yang terlepas dari nilai-nilai sipiritualitas, kemanusiaan, solidaritas kebangsaan, musyawarah, dan keadilan merupakan pencederaan terhadap amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dokumen sejarah bangsa Indonesia.

### **Sumber Sosiologis Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu**

Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan

### **Sumber Politis Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu**

Dokumen pada masa Orde Lama yang meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan atau orientasi ilmu, antara lain dapat dilihat dari pidato Soekarno ketika menerima gelar Doctor Honoris Causa di UGM pada 19 September 1951, mengungkapkan hal sebagai berikut:

*“Bagi saya, ilmu pengetahuan hanyalah berharga penuh jika ia dipergunakan untuk mengabdikan kepada praktik hidup manusia, atau praktiknya bangsa, atau praktiknya hidup dunia kemanusiaan. Memang sejak muda, saya ingin mengabdikan kepada praktik hidup manusia, bangsa, dan dunia kemanusiaan itu. Itulah sebabnya saya selalu mencoba menghubungkan ilmu dengan amal, menghubungkan pengetahuan dengan perbuatan sehingga pengetahuan ialah untuk perbuatan, dan perbuatan dipimpin oleh pengetahuan. Ilmu dan amal harus wahyu-mewahyui satu sama lain. Buatlah ilmu berdwitunggal dengan amal. Malahan, angkatlah derajat kemahasiswaanmu itu kepada derajat mahasiswa patriot yang sekarang mencari ilmu, untuk kemudian beramal terus menerus di wajah ibu pertiwi” (Ketut, 2011).*

Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pada zaman Orde Lama belum secara eksplisit dikemukakan, tetapi oleh Soekarno dikaitkan langsung dengan dimensi kemanusiaan dan hubungan antara ilmu dan amal.

Pada zaman Orde Baru, Presiden Soeharto menyinggung masalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu ketika memberikan sambutan pada Kongres Pengetahuan Nasional IV, 18 September 1986 di Jakarta sebagai berikut:

*“Ilmu pengetahuan dan teknologi harus diabdikan kepada manusia dan kemanusiaan, harus dapat memberi jalan bagi peningkatan martabat manusia dan*

*kemanusiaan. Dalam ruang lingkup nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi yang ingin kita kuasai dan perlu kita kembangkan haruslah ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisamemberi dukungan kepada kemajuan pembangunan nasional kita. Betapapun besarnya kemampuan ilmiah dan teknologi kita dan betapapun suatu karya ilmiah kita mendapat tempat terhormat pada tingkat dunia, tetapi apabila kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak dapat membantu memecahkan masalahmasalah pembangunan kita, maka jelas hal itu merupakan kepincangan, bahkan suatu kekurangan dalam penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi” (Soeharto, 1986: 4).*

Demikian pula halnya dengan zaman Orde Baru, meskipun Pancasila diterapkan sebagai satu-satunya asas organisasi politik dan kemasyarakatan, tetapi penegasan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia belum diungkapkan secara tegas. Penekanannya hanya pada iptek harus diabdikan kepada manusia dan kemanusiaan sehingga dapat memberi jalan bagi peningkatan martabat manusia dan kemanusiaan.

Habibie dalam pidato 1 Juni 2011 menegaskan bahwa penjabaran Pancasila sebagai dasar nilai dalam berbagai kebijakan penyelenggaraan negara merupakan suatu upaya untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan (Habibie, 2011: 6). Berdasarkan pemaparan isi pidato para penyelenggara negara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sumber politis dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek lebih bersifat apologis karena hanya memberikan dorongan kepada kaum intelektual untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila lebih lanjut.

Tantangan Terhadap Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Iptek Di Indonesia

- a. Kapitalisme yang menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas.
- b. Globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negaranegara lain.
- c. Konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya.
- d. Pragmatisme yang berorientasi pada tiga ciri, yaitu: *workability* (keberhasilan), *satisfaction* (kepuasan), dan *result* (hasil) (Titus, dkk., 1984) mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia.

Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa terminologi yang dikemukakan para pakar untuk menggambarkan peran Pancasila sebagai rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, antara lain Pancasila sebagai

intellectual bastion (Sofian Effendi); Pancasila sebagai common denominator values (Muladi); Pancasila sebagai paradigma ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luas.

## **REFERENSI**

Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Pancasila, Cetakan I, Ristekdikti 2016

Modul Pancasila, Mahkamah Konstitusi, 2015

Modul Materi Ajar Perkuliahan Pendidikan Pancasila, Kemendikbud, 2013